

MUHAMMADIYAH DALAM DINAMIKA PERPOLITIKAN INDONESIA ERA KEPEMIMPINAN AMIEN RAIS

¹Bimba Valid Fathony

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹email: bimbavalid06.bv@gmail.com

²Mutiullah

²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²email: mutiullah@uin-suka.ac.id

Abstract:

Since its inception, Muhammadiyah has not been a political party or political organization, but that does not mean that this organization is anti-politics. Muhammadiyah also plays a role in coloring the dynamics of politics in Indonesia. This research uses qualitative research methods, the type used is literature study. The scope of discussion includes 1). Muhammadiyah Political Style. 2). Short Biography of Amien Rais. 3). Amien Rais' Political Views. 4). Muhammadiyah in the Dynamics of Indonesian Politics in the Era of Amien Rais Leadership. A brief conclusion in this research is that Amien Rais is a Muhammadiyah political figure where he has the idea of high politics. Muhammadiyah in politics applies a national political pattern where it is not affiliated with any political party. Muhammadiyah during the era of Amien Rais' leadership criticized many government policies which were felt to be detrimental to society, while still adhering to the principle of *amar ma'ruf nahi munkar*. Amien Rais created the Partai Amanat Nasional (PAN) as an effort for political *ijtihad*. Based on the research results obtained, this research is expected to have major implications for the political climate in Indonesia in the current era, especially for the Muhammadiyah organization to continue to use the right strategy in dealing with politics in Indonesia, namely Amien Rais' high politics strategy.

Abstrak:

Muhammadiyah sejak awal didirikannya memang bukan sebagai partai politik ataupun organisasi politik, namun bukan berarti organisasi ini anti terhadap politik. Muhammadiyah turut ikut andil dalam mewarnai dinamika perpolitikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana jenis yang digunakan yaitu studi pustaka. Lingkup pembahasannya mencakup, mencakup 1). Gaya Berpolitik Muhammadiyah. 2). Biografi Singkat Amien Rais. 3). Pandangan Politik Amien Rais. 4). Muhammadiyah dalam Dinamika Perpolitikan Indonesia Era Kepemimpinan Amien Rais. Kesimpulan singkat dalam penelitian ini yaitu, Amien Rais merupakan tokoh politik Muhammadiyah dimana ia memiliki gagasan *high politics*. Muhammadiyah dalam berpolitik menerapkan pola politik kebangsaan dimana ia tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Muhammadiyah pada era kepemimpinan Amien Rais banyak memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat, dengan tetap berpegang prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Dirikanya Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Amien Rais sebagai upaya *ijtihad politik*. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi besar terhadap iklim perpolitikan di Indonesia era sekarang terkhusus bagi persyarikatan Muhammadiyah untuk tetap memakai strategi yang tepat dalam menghadapi perpolitikan di Indonesia yaitu strategi *high politics* Amien Rais.

Keywords:

Muhammadiyah; Politics; Indonesia; Amien Rais

Kata Kunci:

Muhammadiyah; Perpolitikan; Indonesia; Amien Rais



The JTE: Journal of Thought and Education content is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Muhammadiyah dalam perjalanan sejarah tidak bisa lepas dengan berbagai kontribusi yang telah diberikan kepada bangsa ini. Dengan berbagai amal usaha yang dimilikinya merupakan bentuk ikhtiar besar yang dilakukan Muhammadiyah untuk membangun bangsa. Muhammadiyah dengan usia yang lebih tua dari Republik Indonesia terus berupaya memberikan jawaban atas segala tantangan zaman yang tidak pernah lelah mensejahterakan masyarakat Indonesia, dalam aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan (Masmuh, 2020).

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang mana dalam perjalanan sejarah bangsa ini tidak bisa lepas dari persoalan dan dinamika politik yang ada. Dampak dari dinamika politik ini sangat luas, tidak hanya bagi pemangku kebijakan saja akan tetapi merambah pada masyarakat dan seluruh elemen-elemen bangsa. Pada masa orde baru, merupakan sebuah gejolak besar dalam perpolitikan di Indonesia yang berpuncak pada tahun 1998 dengan adanya krisis ekonomi yang sedemikian parah. Memasuki era reformasi tidak sedikit dinamika dan gejolak politik yang mewarnai negeri ini (Taufiq Alamsyah, 2020).

Muhammadiyah dalam sikapnya pada perpolitikan selalu berupaya untuk “netral”, akan tetapi kata “netral” tersebut tidak jarang dipahami secara beragam, netralitas tersebut dapat dipahami pada dua aspek yaitu pasif dan aktif. Netralitas secara pasif diartikan bahwa ia akan menjaga jarak dengan seluruh partai politik, posisi ini terkadang memunculkan anggapan bahwa Muhammadiyah seolah anti politik. Selanjutnya netralitas secara aktif, diartikan dengan tetap menjaga hubungan dengan partai politik posisi ini terkadang menimbulkan persoalan dikarenakan tuntutan untuk bersikap netral di lain sisi untuk bersikap aktif. Muhammadiyah pada posisi ini tidak berpihak pada salahsatu kekuatan politik tertentu dengan sikap yang aktif menyerukan nilai-nilai politik adiluhung (Hadisaputra, 2021).

Sebagai sebuah gerakan, Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dengan dari situasi dan dinamika politik bangsa. Di era reformasi tokoh Muhammadiyah turut andil dalam hal ini, tokoh tersebut salahsatunya adalah Amin Rais ia merupakan tokoh fenomeal yang menjadi representasi era reformasi kala itu. Amien Rais memiliki pandangan (high politics) “politik adiluhung”, pada era reformasi Muhammadiyah menggunakan pandangan “politik kultural” yang mana tidak melibatkan secara aktif dalam pemerintahan baik dalam struktur maupun institusi-institusi politik seperti halnya “politik adiluhung” yang digagas Amien Rais, Muhammadiyah tetap menjadi tonggak penentu dalam momen-momen kebangsaan yang strategis tanpa harus terjebak dalam politik kekuasaan maupun politik kepemiluan (Al-Hamdi, 2022). Muhammadiyah pada era kepemimpinan Amien Rais turut andil dalam perpolitikan bangsa ini lewat



gagasan high politics dengan diwujudkan lewat saran, sikap kritis yang konstruktif kepada pemerintah hal ini diupayakan agar situasi politik menjadi lebih baik dikarenakan kondisi politik bangsa Indonesia dihadapkan oleh banyak problem seperti halnya ekonomi, kurang keterbukaanya demokrasi, dan lain sebagainya.

Adapun penelitian terdahulu dengan topik yang relevan dengan penelitian ini, peneliti meninjau dari jurnal yang disusun oleh Hadisaputra, Mustari Bosra, dan Andi Asywid Nur dengan judul “Studi Naratif Politisi Muhammadiyah pada Era Orde Lama Hingga Orde Baru (Biografi Abdul Wahab Radjab)” Hadisaputra dkk, “Studi Naratif Politisi Muhammadiyah Pada Era Orde Lama Hingga Orde Baru (Biografi Abdul Wahab Radjab),” *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* Vol.10 No.2, 2022. Pada penelitian tersebut menerangkan tentang peran tokoh Muhammadiyah pada level lokal yang dimana turut berkecimpung dalam perpolitikan, sebagai pembeda dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini menerangkan peran tokoh cendekiawan/politisi Muhammadiyah dalam skala nasional. Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Asep Indra Gunawan dengan judul “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyyah* Vol.4 No.1, 2019. Pada penelitian tersebut memaparkan tentang bagaimana hubungan agama dan negara dalam pandangan kedua tokoh salahsatunya yaitu Amien Rais, pada penelitian ini tidak akan membahas bagaimana hubungan agama dan negara dalam pandangan Amien Rais, melainkan bagaimana Muhammadiyah dalam dinamika perpolitikan Indonesia era kepemimpinan Amien Rais. Kemudian, skripsi yang ditulis Zammil dengan judul “Analisis Framming Berita Pernyataan Amin Rais tentang “Partai Setan vs Partai Allah” di Republika.co.id dan CNNIndonesia.com”(Zammil, 2019). Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang narasi media terhadap statement politik Amien Rais, sedangkan yang akan peneliti bahas pada penelitian ini yaitu tentang kepemimpinan Amien Rais dan bagaimana dinamika Muhammadiyah dalam perpolitikan Indonesia era kepemimpinan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan tentang bagaimana Muhammadiyah dalam dinamika perpolitikan Indonesia era kepemimpinan Amien Rais, dimana lingkup pembahasan pada penelitian akan menguraikan beberapa poin mencakup 1). Gaya Berpolitik Muhammadiyah. 2). Biografi Singkat Amien Rais. 3). Pandangan Politik Amien Rais. 4). Muhammadiyah dalam Dinamika Perpolitikan Indonesia Era Kepemimpinan Amien Rais.

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam makalah ini memakai metode penelitian kualitatif yang mana jenis yang digunakan yaitu riset pustaka (*library research*). Pada penelitian ini data yang peneliti temukan akan dipaparkan secara deskriptif-analitis. Adapun sumber pustaka yang peneliti ambil yaitu dari sumber yang membahas tentang pemikiran politik Amien Rais dan perpolitikan Muhammadiyah seperti halnya buku, jurnal, dan artikel lainnya yang relevan dengan penelitian ini dimana kemudian peneliti gunakan sebagai sumber rujukan primer.

Dalam teori politik memiliki dua makna; *pertama* menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna *kedua* menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Contoh teori politik yang merupakan pemikiran spekulatif adalah teori politik Marxis-Leninis atau komunisme, contoh lain adalah teori politik yang berdasar pada pemikiran Adam Smith kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka dalam tulisannya Madilog, merupakan contoh teori politik Indonesia. Nasakom yang diajukan Soekarno merupakan contoh lain.

Sedangkan teori politik sebagai hasil kajian empirik bisa dicontohkan dengan teori struktural - fungsional yang diajukan oleh Talcot Parson (seorang sosiolog), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi *Civic Culture*. Konsep sistem politik sendiri merupakan ciptaan para akademisi yang mengkaji kehidupan politik (sesungguhnya diturunkan dari konsep *sistem sosial*) (Lubis, 2008).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gaya Berpolitik Muhammadiyah

Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana gaya berpolitik Muhammadiyah, perlu kita kaji terlebih dahulu tentang peranan Muhammadiyah yang telah dilakukan dalam perjalanan bangsa ini. *Pertama*, sebagai gerakan pembaruan keagamaan (*religious reform movement*). *Kedua*, sebagai agen/ perantara bagi perubahan sosial (agent of social change). *Ketiga*, sebagai kekuatan politik (political power). Apabila dijabarkan dari ketiga tersebut yaitu, peranan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan keagamaan dapat dilihat dari maksud dan tujuan Muhammadiyah dimana berupaya untuk memurnikan cara beragama Islam yang kembali merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedomannya (Gunawan, 2019).

Muhammadiyah turut berperan sebagai perantara perubahan sosial, dimana organisasi ini telah memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa dan ummat lewat amal usaha yang bergerak pada pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah berupaya keras membebaskan dan mengentaskan belenggu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan yang saat itu menimpa umat Islam, tidak hanya itu, Muhammadiyah turut berjuang memurnikan cara beragama umat Islam yang masih tercampur dengan praktek-prakter tahayul, bid'ah, dan khurofat untuk kembali ke ajaran Islam yang murni yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Suwarno & Asep Daud Kosasih, 2014).

Kemudian, hal yang terpenting yang kemudian akan menjadi topik pembahasan pada penelitian ini. Peranan Muhammadiyah sebagai kekuatan politik, dimana disini sangat erat kaitanya dengan posisi Muhammadiyah sebagai organisasi Masyarakat (ormas) yang memiliki peran lebih dalam posisinya sebagai kelompok kepentingan (*interest group*). Dalam posisi ini, Muhammadiyah memiliki peran besar kepada bangsa Indonesia. *Pertama*, Muhammadiyah turut serta mengembangkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesatuan politik. *Kedua*, Muhammadiyah telah menjadi tempat/wadah dalam kemandirian masyarakat untuk kemudian dikembangkan (Mitsuo, 1990).

Tentang bagaimana andil Muhammadiyah sebagai kekuatan politik erat kaitanya dengan perkembangan organisasi ini sebagai salahsatu kelompok kepentingan (*interest group*) juga dilain sisi, seberapa jauh hubungan Muhammadiyah denga partai politik dan ikut terlibatnya Muhammadiyah dalam politik praktis dapat dilihat terutama dari para elit pimpinanya, dimana hal tersebut dapat menjadi tolak ukur bagaimana peran Muhammadiyah sebagai kekuatan politik.

Sejarah Perpolitikan Muhammadiyah

Semenjak Muhammadiyah didirikan, organisasi memang bukan organisasi politik, tetapi bukan berarti anti politik. K.H. Ahmad Dahlan dan para pimpinan Muhammadiyah telah membuat semacam garis konvensi politik lewat keterlibatannya untuk turut serta secara pribadi dalam partai politik yang ada. Seperti halnya K.H. Ahmad Dahlan, beliau juga terlibat dalam hal tersebut seperti halnya, beliau juga pernah menjadi anggota Budi Utomo (BU) di tahun 1909, pada tahun 1910 turut terlibat menjadi anggota Jam'iyat Al-Khair, kemudian di tahun selanjutnya 1911 menjadi bagian dari Sarekat Islam (SI). Selain K.H. Ahmad Dahlan, tokoh lain juga yaitu K.H Mas Mansur (Ketua PP Muhammadiyah 1937-1942), beliau juga dikenal dan turut berperan menjadi salahsatu penggagas (tokoh kunci) lahirnya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada bulan September 1937, juga di tahun 1938 tepatnya bulan Desember didirikan juga Partai Islam Indonesia (PII) (Suwarno & Asep Daud Kosasih, 2014).

Di samping itu, Muhammadiyah secara organisatoris pernah terlibat dalam politik praktis walaupun secara tidak langsung yaitu ketika menjadi anggota istimewa Partai Islam Masyumi. Muhammadiyah turut membidani lahirnya dan pembentukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 7 November 1945 di Yogyakarta. Semenjak saat itu hingga Partai Islam Masyumi diputuskan untuk dibubarkan era pemerintahan rezim Demokrasi Terpimpin di tahun 1960, Muhammadiyah turut menjadi pendukung dan tulang punggung utamanya. Dapat dikatakan, pada kurun waktu 1945-1960, Masyumi telah menjadi representasi politik Muhammadiyah, sebagai kekuatan politik Islam yang menjadi saluran resmi, bahkan dapat dikatakan ada keidentikan dengan Muhammadiyah (Nashir, 2006).

Fenomena serupa terjadi lagi saat Muhammadiyah turut membidani lahirnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) era awal Orde Baru, lebih tepatnya 20 Februari 1968. Parmusi digunakan Muhammadiyah sebagai saluran politik resmi sama seperti halnya Masyumi yang sebelumnya digunakan oleh Muhammadiyah. Akan tetapi tetap ada perbedaan dimana, jika hubungan Muhammadiyah-Masyumi bersifat ideologis-organisatoris, maka hubungan Muhammadiyah-Parmusi hanya bersifat ideologis (Nashir 2006). Namun ketika pemerintahan rezim Orde Baru terlalu banyak membuat intervensi ke dalam internal Parmusi, yang akhirnya Muhammadiyah mengambil sikap untuk lepas diri dan menjaga jarak dari kaitanya dengan partai politik manapun, sebagaimana diputuskan lewat Mukhtamar ke-38 Muhammadiyah di Ujung Pandang tahun 1971. Lewat keputusannya tersebut menjadi Khittah Politik Muhammadiyah hingga sekarang ini, dimana Muhammadiyah berupaya dengan sikapnya yang netral dan tidak memiliki afiliasi kepada partai politik manapun (Nashir, 2006).

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan pendirinya yaitu H.M. Amien Rais, yang mana ia merupakan mantan ketua PP Muhammadiyah periode 1994-1998, di tanggal 23 Agustus 1998 timbul persepsi bahwa Muhammadiyah mulai terlibat lagi dalam politik praktis. Hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan historis, psikologis dan emosional antara lahirnya PAN dengan sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang, 5-7 Juli 1998 (Suwarno, 2002).

Politik Kebangsaan Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai organisasi atau gerakan sosial-keagamaan dimana bukan sebagai partai politik, oleh karenanya maka peran politik yang ditempuh Muhammadiyah adalah politik kebangsaan bukan politik praktis. Dengan Muhammadiyah menempuh politik kebangsaan, persyarikatan ini dapat menhimbau para kader dan anggotanya, yakni mereka yang menjadi aktivis atau elit politik yang berkecimpung dalam berbagai partai politik yang ada supaya dapat menjembatani aspirasi Muhammadiyah, juga agar berpolitik yang mengedepankan etika politik yang santun yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan Kemuhammadiyahan. Dengan mengikuti konsep politik kebangsaan ini, menjadikan Muhammadiyah tidak berfiliasi ataupun menyalurkan aspirasi kepada suatu partai politik tertentu, akan tetapi merangkul banyak partai politik dimana para aktivis atau elit politik Muhammadiyah terlibat aktif di dalamnya. Maka, pasca Orde Baru atau masa reformasi, para aktivis dan elit politik Muhammadiyah berdiaspora di banyak partai politik yang ada seperti, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), bahkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan belakangan banyak juga yang aktif di partai Demokrat serta partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (Qodir, 2010).

Mengutip dari ungkapan Buya A. Syafii Ma'arif (mantan ketua PP Muhammadiyah 1998-2005) yaitu tentang “politik garam dan bukan politik gincu”.¹ Para aktivis ataupun elit politik Muhammadiyah diupayakan harus dapat mengimplementasikan konsep tersebut dengan tetap dilandasi dengan etika atau fatsoen politik (Qodir, 2010). Hadirnya para aktivis ataupun elit politik Muhammadiyah tersebut harus dapat memberikan manfaat bagi Muhammadiyah hal yang paling utama adalah mengharumkan nama Muhammadiyah, bukan malah sebaliknya dimana hanya “memanfaatkan Muhammadiyah” yang pada akhirnya hanya merusak citra Muhammadiyah itu sendiri.

Biografi Singkat Amien Rais

Amien Rais, sosok politikus yang juga membidani lahirnya reformasi dilahirkan di Solo Jawa Tengah pada tanggal 26 April 1944. Amien Rais merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Ia dibesarkan dalam keluarga dengan kultur keislaman yang kuat yaitu di lingkungan keluarga Muhammadiyah. Nama lengkapnya yaitu Mohammad Amien Rais. Ia merupakan anak dari pasangan

¹Politik gincu merupakan suatu istilah dimana politik ini hanya menekankan pada simbol daripada substansi. Politik garam dapat dimaknai suatu kegiatan politik yang secara simbolisasinya tidak terlihat, namun substansi/isinya dapat dirasakan oleh rakyat.

Syuhud Rais (ayah) yang berasal dari Purbalingga Jawa Tengah dan Sudalmiyah yang dimana keduanya merupakan kader dan aktivis Muhammadiyah.

Semenjak duduk di bangku perkuliahan, Amien Rais turut aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, ia merupakan bagian dari salahsatu pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di samping itu ia juga menuduki jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta. Saat itu ia berkuliah di Yogyakarta tepatnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lulus pada tahun 1968. Kemudian ia menempuh pendidikan masternya di Universitas Notre Dome, Indiana, Amerika Serikat. Dan kemudian pendidikan doktonya ia tempuh di Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat, doktor yang ia tempuh yaitu dalam bidang ilmu politik.

Amien Rais merupakan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana partai tersebut didirikanya pada tahun 1998, partai ini digunakan untuk menyalurkan aspirasi perjuangan Muhammadiyah untuk negara. Amien Rais lah menjadi ketua umunya saat itu, kemudian juga diajukan menjadi presiden di pemilu tahun 1999 dan 2004. Dari manuver politik yang sedemikian gencarnya untuk bangsa Indonesia, maka tidak sedikit kalangan yang menjulukinya sebagai Bapak Bangsa dan yang terpenting ia merupakan bapak reformasi. Pasca pemilu 2004, Amien Rais memutuskan untuk kembali bergelut sebagai akademisi di kampus, dan tetap berkhidmat di Muhammadiyah serta partai Amanat Nasional (Bastian, 2013).

Terkait jabatan yang pernah Amien Rais duduki di perpolitikan Indonesia yaitu ia pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke-10 (1999-2004), Amien Rais juga menjabat sebagai ketua umum Muhammadiyah ke-12 pada periode 1995-2000. Saat menjadi ketua umum Muhammadiyah dimana ia terpilih lewat Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh ke-43. Jabatannya di Muhammadiyah sebagai ketua umum memang tidak sampai selesai dikarenakan ia mendirikan partai PAN dan ia memimpinya juga berkhidmat di partai tersebut. Hal tersebut memang menjadi suatu amanat siding tanwir Muhammadiyah yang dilaksanakan di Semarang pada tahun 1998, dimana Amien Rais diamanatkan untuk melakukan ijtihad politik, dengan tidak mengesampingkan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, untuk mengupayakan kemungkinan didirikanya sebuah partai politik yang dapat menyalurkan aspirasi reformasi (Bagus Mustakim & Nurhuda Kurniawan, 2010).

Pandangan Politik Amien Rais

Amien Rais sebagai sosok intelektual dan juga politisi memiliki gagasan politik yang terkenal yaitu *High Politics* (Politik Kualitas Tinggi) atau dikenal juga sebagai politik adiluhing dimana politik ini memiliki dimensi keluhuran moral yang tinggi. Bagi Amien Rais dengan mengikuti konteks realitas zaman yang ada, sebuah gagasan politik tersebut sudah seharusnya memiliki langkah respon yang tegas terhadap segala bentuk kemaksiatan politik seperti halnya korupsi, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Melalui gagasan politiknya, mengupayakan dapat menjadi suatu ajakan kepada masyarakat untuk memerangi hal tersebut.

Pemerintah turut dihimbau untuk membuka lebar proses demokrasi dan keterbukaan. Apabila hal tersebut sudah dilakukan maka hakekatnya mereka sudah menerapkan *high politics*.

Dalam pandangannya tentang *high politics*, Amien Rais mengelompokkannya ke dalam tiga ciri dari gagasannya tentang politik tersebut. *Pertama*, pada hakikatnya apapun jabatan politik yang diemban adalah amanah dari masyarakat oleh karenanya amanah tersebut harus dipelihara sebaik mungkin. Penyalahgunaan amanah adalah hal yang sangat tidak terpuji, misalnya mengesampingkan kepentingan umum dan lebih mengutamakan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok/golongannya. *Kedua*, setiap jabatan politik mengandung pertanggungjawaban (*mas'uliyah-accountability*). Selaras dengan ajaran Nabi, bahwa setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. *Ketiga*, kegiatan politik secara ketat seharusnya tidak bisa dilepaskan dari prinsip ukhuwwah (*brotherhood*). Dimana harus mengutamakan persamaan antara umat manusia tanpa adanya sekat pembeda, maka dari itu adanya ukhuwwah sudah pasti harus melampaui batas-batas etnis, ras, agama, latar belakang budaya sosial yang ada (Rais 1996).

Sebagai lawan dari politik kualitas tinggi (*high politics*) Amien Rais juga memiliki pandangan tentang politik kualitas rendah (*low politics*). Amien Rais memandang bahwa politik kualitas rendah ini merupakan politik yang tidak memberikan dukungan terhadap tujuan dakwah itu sendiri, yang ada justru menjegal adanya dakwah. Bahkan merusak tatanan masyarakat yang Islami. Terdapat tiga ciri yang terdapat dalam pelaksanaan *low politics*, Amien Rais mengutip dalam buku karya Niccolli Machiavelli yang berjudul *The Prince* (Rais 1996). *Pertama*, kekerasan (*violence*), kekejaman, tindakan brutal, tidak jarang para penguasa cara-cara tersebut dipakai oleh para penguasa bahkan mereka dapat menggunakannya kapan saja asal tujuan yang diinginkan dapat dicapai. *Kedua*, terhadap para musuh-musuh yang ada harus ditaklukan secara total dimana hal ini dianggap sebagai suatu kebajikan yang tinggi (*summum bonum*). Tidak memberi kesempatan bagi musuh untuk bangkit, hal yang terparah mereka memandang musuh bukan lagi sebagai manusia bahkan dianggap seperti halnya barang. *Ketiga*, dalam jalanya kehidupan politik, seorang penguasa harus bisa bermain seperti halnya hewan buas, dia setidaknya bisa seperti singa dan sekaligus anjing pemburu. Saat penguasa berperan seperti anjing pemburu dia harus memiliki kecerdikan untuk mengetahui perangkap yang mungkin meghadap di depannya, sedangkan menjadi singa buas agar musuh merasa takut (Adam, 1999).

High Politics dan Kewajiban Moral Muhammadiyah

Muhammadiyah dalam berpoltik terus berpegang teguh diatas prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, dimana Muhammadiyah akan terus ikut andil berperan secara arif dan bijaksana. Dari sikap inilah yang kemudian menjadi lahir gagasan *high politics*, sebagai politik yang juga dipegang Muhammadiyah dalam upaya menjalankan perannya untuk mengontrol jalanya pemerintahan. Tentu fungsi control yang dilaksanakan Muhammadiyah tidaklah sama dengan fungsi control yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif. Untuk hal ini, Amien Rais menegaskan bahwa:

“Muhammadiyah menyatakan secara tegas bahwa Muhammadiyah mendukung pemerintah, bukan tanpa *reserve*. Maknanya bahwa dukungan Muhammadiyah terhadap pemerintah bukan dukungan buta, melainkan dukungan bersyarat. Tidak sekarang saja, sesungguhnya sejak dulu hal itu merupakan sikap moral politik Muhammadiyah. Kalau pemerintah masih tetap lurus, dalam arti berorientasi kepada kerakyatan, mengasah dan mempertajam keberanian moralnya untuk mengatasi korupsi dan menanggulangi kolusi, tentu otomatis dukungan Muhammadiyah akan terus. Namun demikian, kalau di masa-masa mendatang ternyata pemerintah tidak sanggup lagi menanggulangi korupsi dan mengatasi kolusi, maka Muhammadiyah hanya bisa mendo’akan, mudah-mudahan pemerintah dilindungi oleh Allah SWT”.(Rais, 1998)

Dari apa yang diungkapkan Amien Rais tersebut, jelas sekali bahwa *high politics* yang diperankan oleh Muhammadiyah terhadap terselenggaranya roda kehidupan berbangsa dan bernegara oleh pemerintah. Mengandung arti bahwa, dalam tataran implementasi, Muhammadiyah memberikan dukungan terhadap atas kebijakan yang ada selama berorientasi pada kepentingan rakyat dan masyarakat. Namun sebaliknya, Muhammadiyah akan tetap kritis apabila dari kebijakan yang ada dirasa justru membuat kerugian atau malah justru mensengsarakan rakyatnya.

Perlu ditegaskan kembali, *high politics* yang digagas oleh Amien Rais merupakan suatu pendekatan politik yang penuh dengan unsur etika dan moral. *High politics* juga menjadi suatu pendekatan dimana politik ini tidak bermaksud untuk memperoleh cuilan-cuilan dari kekuasaan, akan tetapi sebagai sikap kritis terhadap kekuasaan manakala kekuasaan yang dijalankan keluar dari koridor yang semestinya. Kekuasaan sudah selayaknya digunakan untuk mengayomi masyarakat menyokong berbagai bentuk kebaikan bersama, bukan malah sebaliknya. *High politics* yang juga diterapkan oleh Muhammadiyah sebagai upaya pengawalan terhadap segala kebijakan pemerintah, dengan tetap berpegang pada prinsip *amar ma’ruf nahi munkar*.

Muhammadiyah Dalam Dinamika Perpolitikan Indonesia Era Kepemimpinan Amien Rais

Dinamika politik memang tidak jarang menimbulkan bermacam gejolak yang cukup menguras daya tenaga baik para politisi ataupun organisasi-organisasi/institusi yang turut terlibat maupun yang terkena dampak dari dinamika tersebut.

Muhammadiyah pada prakteknya saat terlibat dalam perpolitikan di Indonesia selain menggunakan *high politics* juga menerapkan *allocative politics*. *High politics* sebagai suatu pendekatan yang mana orientasinya adalah tujuan moralitas yang luhur selaras dengan harkat martabat kemanusiaan. Sedangkan *allocative politics* sebagai upaya politik dimana nilai-nilai Islam terus dialokasikan dalam kehidupan keseharian di dalam konteks bernegara (Jurdi, 2010). Seperti yang sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya terkait bagaimana gaya berpolitik Muhammadiyah, pada poin ini akan diuraikan bagaimana Muhammadiyah menghadapi dinamika perpolitikan di Indonesia era kepemimpinan Amien Rais. Pada era kepemimpinan

ini (1994-1998) Muhammadiyah menampilkan corak dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai prinsip yang ia pegang. Era kepemimpinan Amien Rais ini, Muhammadiyah begitu kritis terutama dalam memberikan tanggapan pada fenomena ketimpangan sosial, politik, serta apa yang sedang bangsa ini bangun terutama dalam hal ekonomi kala itu. Dengan berbekal tindak upaya yang akomodatif, kooperatif, dan moderatif yang terus melekat dengan tetap diatas sikap *amar ma'ruf nahi munkar* upaya kritik tersebut akan semakin terus digencarkan agar kebenaran dan keadilan dapat terus ditegakkan.

Muhammadiyah dikala Amien Rais memimpin, secara terbuka memberikan kritik pada kebijakan pemerintah yang membawa kerugian pada masyarakat seperti halnya kasus Busang dan Freeport. Muhammadiyah terus lantang memberikan kritik kepada di era kepemimpinia Orde Baru yang didalamnya banyak dijumpai Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), kritikan yang digaungkan menuntut adanya suksesi kepemimpinan bangsa melalui gerakan reformasi. Sudah tidak menjadi rahasia lagi, kritik pedas yang dilakukan secara terbuka sudah menimbulkan reaksi kepada rezim Orde Baru yang pastinya menimbulkan ketegangan yang berdampak pada kerenggangan hubungan antar kedua pihak tersebut. Dengan dimulainya berbagai aksi kebebasan, masyarakat dapat dengan leluasa mengemukakan aspirasinya. Tidak sedikit dijumpai aksi demonstrasi serta pada masa ini banyak muncul partai politik dengan bermacam ideologinya, baik nasionalis maupun agama. Tumbangnya Rezim orde baru memang memberikan angin segar untuk membentuk tatanan politik dan tata pemerintahan yang baru lewat gerakan reformasi.

Amien Rais yang kala itu menjabat sebagai ketua umum Muhammadiyah turut terpanggil untuk berkecimpung ke ranah politik praktis dan melepas jabatannya sebagai ketua umum PP Muhammadiyah yang selanjutnya digantikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Walau kepemimpinan sudah berganti, Muhammadiyah tidak memakai pendekatan politik orientasi politiknya secara frontal, tetapi terus melanjutkan pola kepemimpinan dan kiprah yang sudah dibangun pimpinan sebelumnya (Amien Rais), dengan tetap berlaku kritis pada pemerintah atas berbagai kebijakan yang dijalankannya, sebagai implementasi dari prinsip yang dipegang yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Hanya saja, netralitas menjadi pegangan yang harus tetap dijaga daripada sekedar memilih terjun ke ranah politik praktis dengan mendirikan partai politik yang secara eksplisit mengarahkan pilihan pada salahsatu parpol tertentu.

Sikap netral yang semula dipegang Muhammadiyah pada nyatanya kemudian tidak berjalan mulus. Yaitu saat Amien Rais memilih terjun mencalonkan dirinya sebagai Presiden di pemilu 2004, hal ini menjadi suatu pilihan sulit yang dihadapi oleh Muhammadiyah. Di saat bangsa dihadapkan dengan dinamika krisis multidimensional serta butuh pemimpin yang berkapasitas yang bisa tuntas dalam menganani problematika yang ada, di lain sisi pada saat yang sama dari pihak Muhammadiyah terdapat kader yang menempuh perjuangan politik untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden. Maka darinya, Muhammadiyah berkewajiban menyokong dukungan pada kadernya. Adanya sokongan dan dukungan ini menjadi salahsatu bagian kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Apabila ditelisik dari aspek regulasi politik yang ada, mencalonkan dirinya Amien Rais sebagai presiden Republik Indonesia lewat Partai Amanat Nasional (PAN), maka dalam pemilu legislatif

seharusnya suara partai harus dapat terpenuhi dari suara yang diperoleh sesuai apa yang sudah ditetapkan di UU Pilpres. Jika suara yang diperoleh tidak terpenuhi sesuai ketentuan yang ada tentu hal tersebut akan menghambat Amien Rais dalam mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. Dan hal perlu diupayakan, mau tidak mau, mendukung Amien Rais dimulai dengan menyokong dukungan suara kepada PAN di Pemilu legislatif. Dengan demikian, secara tidak langsung Partai Amanat Nasional mendapat rekomendasi dan legitimasi bahkan anjuran sebagai partai yang utama dipilih oleh warga persyarikatan Muhammadiyah (Latif, 2011).

Sekali lagi ditegaskan dengan Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional hal tersebut menjadi upaya *ijtihad politik*. Adanya Partai Amanat Nasional yang identik dengan Muhammadiyah telah membawa Muhammadiyah dalam mewarnai dinamika perpolitikan Indonesia, Amien Rais yang mana menjadi tokoh sentral pada pergolakan dinamika yang menjadikan Muhammadiyah turut andil dalam reformasi.

Muhammadiyah dalam dinamika perpolitikan Indonesia era kepemimpinan Amien Rais telah mewarnai masa-masa orde baru hingga memasuki era reformasi, dimana Amien Rais menjadi tokoh politisi yang kala itu gencar memberikan kritikan terhadap pemerintah, lewat gagasan *high politics* nya menjadikan Muhammadiyah tetap memiliki wibawa di tengah kancah perpolitikan kala itu dengan dibarengi prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Adanya berbagai tindakan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan segala bentuk tindakan yang merugikan rakyat, menjadikan Amien Rais terus kritis terhadap pemerintahan dan turut berkecimpung di politik mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bentuk *ijtihad politik*.

PENUTUP

Muhammadiyah semenjak awal berdirinya memang bukanlah sebagai organisasi politik ataupun partai politik akan tetapi Muhammadiyah bukan anti politik. Tidak jarang pula dari para anggota ataupun kadernya yang berkecimpung di politik. Politik yang ditempuh oleh Muhammadiyah yaitu politik kebangsaan, dengan mengikuti konsep politik kebangsaan ini, menjadikan Muhammadiyah tidak berfiliasi ataupun menyalurkan aspirasi kepada suatu partai politik tertentu agar supaya aspirasi Muhammadiyah dapat tetap tersalurkan.

Amien Rais merupakan tokoh politisi Muhammadiyah, ia turut berperan besar dalam reformasi sehingga mendapat julukan bapak reformasi. Amien Rais merupakan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana partai tersebut didirikannya pada tahun 1998, partai ini digunakan untuk menyalurkan aspirasi perjuangan Muhammadiyah untuk negara.

Amien Rais memiliki gagasan politik yang terkenal yaitu *High Politics* (Politik Kualitas Tinggi) atau dikenal juga sebagai politik adiluhung dimana politik ini memiliki dimensi keluhuran moral yang tinggi. *High politics* juga menjadi suatu pendekatan dimana politik ini tidak bermaksud untuk memperoleh cuilan-cuilan dari kekuasaan, akan tetapi sebagai sikap kritis terhadap kekuasaan manakala kekuasaan yang dijalankan keluar dari koridor yang semestinya. Kekuasaan sudah selayaknya digunakan untuk mengayomi masyarakat menyokong berbagai bentuk kebaikan bersama, bukan malah sebaliknya. *High politics* yang juga diterapkan

oleh Muhammadiyah sebagai upaya pengawalan terhadap segala kebijakan pemerintah, dengan tetap berpegang pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Era kepemimpinan Amien Rais ini, Muhammadiyah begitu kritis terutama dalam memberikan tanggapan pada fenomena ketimpangan sosial, politik, serta apa yang sedang bangsa ini bangun terutama dalam hal ekonomi kala itu. Dengan berbekal tindak upaya yang akomodatif, kooperatif, dan moderatif yang terus melekat dengan tetap diatas sikap *amar ma'ruf nahi munkar* upaya kritik tersebut akan semakin terus digencarkan agar kebenaran dan keadilan dapat terus ditegakkan. Adanya Partai Amanat Nasional yang identik dengan Muhammadiyah telah membawa Muhammadiyah dalam mewarnai dinamika perpolitikan Indonesia, Amien Rais yang mana menjadi tokoh sentral pada pergolakan dinamika yang menjadikan Muhammadiyah turut andil dalam reformasi. Adanya bermacam bentuk tindakan yang merugikan rakyat, menjadikan Amien Rais terus kritis terhadap pemerintahan dan turut berkecimpung di politik mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bentuk *ijtihad politik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Masmuh, "Peran Muhammadiyah Dalam Membangun Peradaban Dunia," *Gema Kampus IISIP YAPIS* Vol.15 No.1, 2020, hlm. 79–80.
- Asep Indra Gunawan, "Pendapat Yusuf Al - Qardhawi Dan M. Amien Rais Tentang Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Abwal Al-Syakehsyyah* Vol.4 No.1, 2019.
- Auri Adam. 1999. *High Politics Sebagai Kerangka Moral Pemikiran Politik Muhammadiyah*. Malang: Bestari.
- Bagus Mustakim & Nurhuda Kurniawan. 2010. *Amien Rais: Inilah Jalan Hidup Saya*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Insan Madani.
- Gunawan Undang Taufiq Alamsyah, "Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Menggagas Paradigma Hukum Yang Berdaulat," *Global Mind: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol.2 No.2, 2020.
- Hadisaputra dkk, "Studi Naratif Politisi Muhammadiyah Pada Era Orde Lama Hingga Orde Baru (Biografi Abdul Wahab Radjab)," *HISTORLA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* Vol.10 No.2, 2022.
- Hadisaputra, "Etnografi Politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan Dalam Pemilu 2019," *SANG PENCERAH: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* Vol.7 No.3, 2021, hlm. 340–341.
- Haedar Nashir. 2006. *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- M.Amien Rais. 1996. *Cakrawala Islam*. Bandung: Mizan. 1998.
- M.Amien Rais. 1998. *Taubid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan.
- Maksum Syahri Lubis. 2008. "Teori Politik" Diktat Kuliah Untuk Kalangan Sendiri. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.
- Nakamura Mitsuo. 1990. "Dua Kontribusi Muhammadiyah." In *Muhammadiyah Sejarah Pemikiran Dan Amal Usaha*, 114. Malang: Pusat Dokumentasi dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nazaruddin Latif. 2011. "Dinamika Politik Muhammadiyah." *Tajdid* 9(1): 131–32.

- <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2375/6.SYARIFUDIN.pdf;sequence=1>.
- Radis Bastian. 2013. *Para Pahlawan Terhebat Pengubah Indonesia*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Palapa.
- Ridho Al-Hamdi, “Tipologi Kepemimpinan Elite Muhammadiyah Di Era Reformasi,” 2022, <https://muhammadiyah.or.id/tipologi-kepemimpinan-elite-muhammadiyah-di-era-reformasi/>.
- Suwarno & Asep Daud Kosasih. 2014. *Relasi Agama Dan Negara Dalam Skala Lokal, Dinamika Politik Gerakan Muhammadiyah Di Banyumas*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan UMP Press.
- Suwarno. 2002. *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*. Cet. Ke-II. Yogyakarta: UII Press.
- Syarifuddin Jurdi. 2010. *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zammil, “Analisis Framming Berita Pernyataan Amin Rais Tentang ‘Partai Setan vs Partai Allah’ Di Republika.Co.Id Dan CNNIndonesia.Com” (Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, 2019).
- Zuly Qodir. 2010. *Muhammadiyah Studies Reorientasi Gerakan Dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*. Yogyakarta: Kanisius.